



## Pendampingan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Dusun: Transparan dan Akuntabel di Desa Wonokerto Kabupaten Pasuruan

### *Assistance in the Implementation of Hamlet Head Elections: Transparent and Accountable in Wonokerto Village, Pasuruan Regency*

Daryono <sup>1</sup>, Nunuk Indarti <sup>2\*</sup>, M. Bayu Firmansyah <sup>3</sup>, Jakaria Umro <sup>4</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan, Universitas PGRI Wiranegara, Indonesia

<sup>2</sup> Program Studi Pendidikan Ekonomi, Universitas PGRI Wiranegara, Indonesia

<sup>3</sup> Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas PGRI Wiranegara, Indonesia

<sup>4</sup> Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas PGRI Wiranegara, Indonesia

Email : [nunukindarti53@gmail.com](mailto:nunukindarti53@gmail.com)

\*Penulis Korespondensi : [nunukindarti53@gmail.com](mailto:nunukindarti53@gmail.com)

#### **Article History:**

Naskah Masuk: 21 November 2025;

Revisi: 19 Desember 2025;

Diterima: 16 Januari 2026;

Tersedia: 22 Januari 2026

**Keywords:** Accountability, Mentoring, Transparency, Village Democracy, Village Head Election.

**Abstract.** The Hamlet Head Election is an important part of the practice of village democracy that demands transparent, accountable, and participatory implementation. However, in practice, various obstacles are still encountered, such as limited understanding of regulations by the committee, low democratic literacy of the community, and potential conflicts due to lack of information disclosure. This community service activity aims to accompany the implementation of the Hamlet Head Election in Wonokerto Village so that it runs transparently and accountably. The service methods used include socialization of hamlet head election regulations, technical assistance to the election committee, education to the community regarding the rights and obligations of voters, and monitoring and evaluation of the election implementation. The results of the activity show an increase in the committee's understanding of election procedures in accordance with the principles of village governance, increased community participation, and the implementation of more open and accountable election. Thus, this community service activity can have a positive impact on the implementation of more open and accountable elections, as well as creating a healthy and sustainable democratic climate at the village level.

#### **Abstrak**

Pemilihan Kepala Dusun merupakan bagian penting dari praktik demokrasi desa yang menuntut penyelenggaraan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. Namun, dalam praktiknya masih dijumpai berbagai kendala, seperti keterbatasan pemahaman panitia terhadap regulasi, rendahnya literasi demokrasi masyarakat, serta potensi konflik akibat kurangnya keterbukaan informasi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mendampingi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Dusun di Desa Wonokerto agar berjalan secara transparan dan akuntabel. Metode pengabdian yang digunakan meliputi sosialisasi regulasi pemilihan kepala dusun, pendampingan teknis kepada panitia pemilihan, edukasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemilih, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemilihan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman panitia terhadap prosedur pemilihan yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan desa, meningkatnya partisipasi masyarakat, serta terselenggaranya pemilihan yang lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini dapat memberikan dampak positif bagi pelaksanaan pemilihan yang lebih terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, serta menciptakan iklim demokrasi yang sehat dan berkelanjutan di tingkat desa.

**Kata kunci :** Akuntabilitas, Demokrasi Desa, Pemilihan Kepala Dusun, Pendampingan, Transparansi.

## **1. PENDAHULUAN**

Desa merupakan unit pemerintahan terdepan yang memiliki peran strategis dalam pelaksanaan demokrasi lokal. Salah satu wujud nyata demokrasi desa adalah penyelenggaraan pemilihan perangkat desa, termasuk pemilihan Kepala Dusun. Kepala Dusun memiliki peran penting sebagai penghubung antara pemerintah desa dan masyarakat di wilayah dusun, sehingga proses pemilihannya harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif agar menghasilkan pemimpin yang legitimate dan dipercaya masyarakat (Dwipayana, 2018).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa harus berlandaskan pada prinsip keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, serta keadilan. Prinsip-prinsip tersebut menjadi fondasi utama dalam setiap proses pengambilan keputusan di tingkat desa, termasuk dalam pemilihan Kepala Dusun. Namun demikian, dalam praktik di lapangan masih dijumpai berbagai permasalahan, seperti keterbatasan pemahaman panitia pemilihan terhadap regulasi, kurangnya transparansi dalam tahapan pemilihan, serta rendahnya literasi demokrasi masyarakat desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014).

Desa Wonokerto, sebagai salah satu desa yang melaksanakan pemilihan Kepala Dusun, menghadapi tantangan serupa. Beberapa tahapan pemilihan berpotensi menimbulkan persepsi ketidakadilan apabila tidak disertai dengan sosialisasi yang memadai dan pendampingan yang berkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan kapasitas panitia pemilihan dan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam proses demokrasi desa menjadi kebutuhan yang mendesak. Tanpa pendampingan yang tepat, proses pemilihan berisiko menimbulkan konflik sosial dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa (Sutoro Eko, 2017).

Pendampingan penyelenggaraan pemilihan Kepala Dusun merupakan salah satu bentuk peran strategis perguruan tinggi dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa yang baik (good governance). Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat, perguruan tinggi dapat berkontribusi dalam memberikan edukasi regulasi, pendampingan teknis, serta penguatan nilai-nilai demokrasi kepada panitia dan masyarakat desa. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan UNDP (2019) yang menekankan pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan lokal guna mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini difokuskan pada pendampingan penyelenggaraan pemilihan Kepala Dusun di Desa Wonokerto. Kegiatan ini diharapkan mampu mendorong terwujudnya proses pemilihan yang transparan dan akuntabel, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta memperkuat praktik demokrasi lokal

sebagai bagian dari pembangunan desa yang berkelanjutan.

## **2. METODE**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang untuk mendampingi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Dusun di Desa Wonokerto dengan pendekatan partisipatif, edukatif, dan kolaboratif. Pendekatan partisipatif dinilai efektif dalam menguatkan kapasitas kelembagaan desa dan mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses demokrasi lokal (Hamidin & Setiawan, 2025).

### **Lokasi dan Waktu Pelaksanaan**

Kegiatan dilaksanakan sepanjang tahapan pemilihan Kepala Dusun di Desa Wonokerto, mencakup pra-pemilihan, pelaksanaan, serta evaluasi pasca-pemilihan. Waktu pelaksanaan disesuaikan dengan jadwal resmi yang ditetapkan panitia desa, sehingga pendampingan dapat berjalan secara berkesinambungan dan terintegrasi dengan proses demokrasi desa. Pendekatan ini penting untuk memastikan aktivitas pengabdian dapat memberikan dampak nyata pada setiap fase pemilihan.

### **Partisipasi Aktif Masyarakat dan Panitia**

Pendampingan dirancang sebagai proses kolaboratif antara tim pengabdi, panitia pemilihan, serta masyarakat setempat. Keterlibatan aktif masyarakat desa dalam setiap kegiatan edukasi dan diskusi merupakan aspek penting untuk meningkatkan literasi demokrasi dan pemahaman terhadap mekanisme pemilihan (Hapu Mbay et al., 2023)

### **Sosialisasi Regulasi dan Edukasi Demokrasi**

Sosialisasi dilakukan dalam bentuk workshop, diskusi kelompok, dan sesi tanya jawab mengenai prinsip-prinsip demokrasi, tahapan pemilihan, serta cara berpartisipasi yang baik dan benar. Sosialisasi ini dirancang untuk memperkuat pemahaman tentang keterbukaan informasi, hak suara, serta akuntabilitas panitia dalam proses pemilihan, yang merupakan elemen utama dalam praktik demokrasi desa (Implementasi Nilai-Nilai Demokrasi, 2022).

### **Pendampingan Teknis kepada Panitia Pemilihan**

Pada tahapan teknis, tim pengabdi membantu panitia dalam penyusunan tata tertib pemilihan, administrasi daftar pemilih, serta mekanisme tata cara pemungutan suara yang adil dan terbuka. Pendampingan teknis ini bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas panitia dalam menjalankan setiap proses secara akuntabel dan sesuai standar demokrasi.

### **Monitoring dan Evaluasi**

Monitoring dilakukan secara berkala selama seluruh tahapan pemilihan untuk memastikan setiap kegiatan berjalan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Evaluasi hasil pelaksanaan dicatat melalui observasi, kuesioner sederhana kepada panitia dan masyarakat, serta refleksi bersama setelah pemilihan berakhir. Monitoring partisipatif seperti ini telah terbukti efektif dalam memperbaiki kualitas demokrasi di tingkat akar rumput desa jika dilakukan secara berkesinambungan (Hamidin & Setiawan, 2025).

### **Analisis Data dan Pelaporan**

Data yang dikumpulkan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis fokus pada pemahaman, sikap, serta tingkat partisipasi masyarakat dan kinerja panitia dalam menyelenggarakan pemilihan. Temuan kemudian disusun dalam laporan pengabdian serta artikel ilmiah sebagai bahan diseminasi untuk praktik terbaik pendampingan pemilihan demokratis di desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus komparatif berbasis benchmarking. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai praktik budidaya cabai rawit dan proses pengambilan keputusan petani di dua wilayah penelitian.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peningkatan Kapasitas Panitia Pemilihan Kepala Dusun**

Hasil kegiatan pengabdian menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan kapasitas panitia pemilihan Kepala Dusun di Desa Wonokerto, khususnya terkait tahapan pemilihan, administrasi, dan prinsip transparansi serta akuntabilitas. Sebelum pendampingan, panitia masih mengalami kesulitan dalam menyusun tata tertib pemilihan, mengelola administrasi pemilihan, serta memahami mekanisme pelaporan yang dapat dipertanggungjawabkan. Melalui kegiatan sosialisasi dan pendampingan teknis, panitia menjadi lebih sistematis dalam menjalankan tugas dan mampu mendokumentasikan setiap tahapan pemilihan secara tertib.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Abidin dan Kurnia (2022) yang menyatakan bahwa pendampingan teknis dan penguatan kapasitas panitia merupakan faktor kunci dalam mewujudkan pemilihan perangkat desa yang demokratis. Selain itu, peningkatan kapasitas kelembagaan lokal merupakan bagian penting dari penguatan tata kelola pemerintahan desa (Hamidin & Setiawan, 2025).

### **Terwujudnya Transparansi dalam Tahapan Pemilihan**

Pelaksanaan pemilihan Kepala Dusun di Desa Wonokerto setelah dilakukan pendampingan menunjukkan tingkat transparansi yang lebih baik. Hal ini ditandai dengan keterbukaan informasi terkait jadwal pemilihan, persyaratan calon, daftar pemilih, serta hasil pemungutan suara yang diumumkan secara terbuka kepada masyarakat. Transparansi ini

mampu mengurangi potensi kesalahpahaman dan kecurigaan antarwarga, sehingga proses pemilihan berlangsung lebih kondusif.

Prinsip keterbukaan informasi merupakan elemen penting dalam praktik demokrasi lokal dan good governance, khususnya di tingkat desa (UNDP, 2019). Penelitian Hapu Mbay et al. (2023) juga menegaskan bahwa transparansi dalam pemilihan kepala desa berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilihan dan legitimasi pemimpin terpilih.

### **Meningkatnya Partisipasi dan Kesadaran Demokrasi Masyarakat**

Hasil pengabdian menunjukkan adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan Kepala Dusun, baik dalam kehadiran pada kegiatan sosialisasi maupun dalam penggunaan hak pilih pada hari pemungutan suara. Masyarakat mulai memahami pentingnya peran mereka dalam menentukan pemimpin di tingkat dusun serta menyadari hak dan kewajiban sebagai warga desa.

Peningkatan literasi demokrasi masyarakat ini tidak terlepas dari pendekatan edukatif dan partisipatif yang diterapkan dalam kegiatan pengabdian. Pendekatan tersebut memungkinkan masyarakat tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek dalam proses demokrasi desa. Hal ini sejalan dengan temuan Israjunna et al. (2023) yang menyatakan bahwa edukasi demokrasi lokal berkontribusi positif terhadap peningkatan partisipasi warga dalam pemilihan kepala desa.

### **Penguatan Akuntabilitas dan Minimnya Potensi Konflik Sosial**

Akuntabilitas penyelenggaraan pemilihan Kepala Dusun di Desa Wonokerto juga mengalami peningkatan, yang tercermin dari tersusunnya laporan pelaksanaan pemilihan serta dokumentasi kegiatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Proses pemilihan yang akuntabel mampu meminimalkan potensi konflik sosial antarpendingkal calon dan memperkuat penerimaan masyarakat terhadap hasil pemilihan.

Pendampingan yang dilakukan berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial dan pembelajaran bersama, sehingga panitia dan masyarakat dapat menjalankan perannya secara proporsional. Temuan ini mendukung pandangan bahwa akuntabilitas dan transparansi merupakan prasyarat utama dalam menjaga stabilitas sosial dan kualitas demokrasi lokal (Abidin & Kurnia, 2022; UNDP, 2019).

### **Implikasi terhadap Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Desa**

Secara keseluruhan, hasil kegiatan pengabdian menunjukkan bahwa pendampingan penyelenggaraan pemilihan Kepala Dusun di Desa Wonokerto memberikan dampak positif terhadap penguatan tata kelola pemerintahan desa. Praktik pemilihan yang transparan,

akuntabel, dan partisipatif tidak hanya menghasilkan proses demokrasi yang lebih berkualitas, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

#### **4. KESIMPULAN**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pendampingan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Dusun di Desa Wonokerto telah memberikan dampak positif terhadap kualitas pelaksanaan demokrasi desa. Pendampingan yang dilakukan melalui sosialisasi regulasi, edukasi demokrasi, pendampingan teknis, serta monitoring dan evaluasi terbukti mampu meningkatkan kapasitas panitia pemilihan, memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pemilihan, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat. Proses pemilihan yang lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan turut meminimalkan potensi konflik sosial dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilihan dan pemerintah desa. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini berkontribusi dalam penguatan tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good governance*) serta dapat dijadikan sebagai model praktik baik bagi penyelenggaraan pemilihan perangkat desa di desa lain secara berkelanjutan. Kesimpulan dibuat dalam bentuk paragraf yang dapat menggambarkan hasil / temuan secara keseluruhan dari kegiatan pengabdian yang telah dilakukan. Kesimpulan harus dapat mengindikasikan secara jelas hasil-hasil yang diperoleh, kelebihan dan kekurangannya, serta kemungkinan pengembangan selanjutnya,

#### **ACKNOWLEDGEMENTS**

Tim pengabdian kepada masyarakat menyampaikan Universitas PGRI Wiranegara menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Desa Wonokerto beserta seluruh perangkat desa, panitia pemilihan Kepala Dusun, dan masyarakat Desa Wonokerto atas dukungan, kerja sama, serta partisipasi aktif yang diberikan selama pelaksanaan kegiatan pendampingan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Dusun. Ucapan terima kasih juga disampaikan atas keterbukaan dan komitmen bersama dalam mewujudkan proses pemilihan yang transparan, akuntabel, dan demokratis sehingga kegiatan pengabdian ini dapat terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi penguatan tata kelola pemerintahan desa.

## REFERENSI

- Addinari, S. S., Maharani, D. D., & Finanda, A. A. (2025). Implementation of democracy in the village: A case study of the village head election in Ciheulang Village. *Jurnal Mahasiswa Yustisi*, 3(2), 69-72. <https://doi.org/10.32832/jurmayustisi.v3i2.1802>
- Andriani, N., & Suryani, E. (2023). Public trust in village head elections: The influence of transparency and information access. *Jurnal Administrasi Pemerintahan*, 16(1), 90-105. <https://doi.org/10.54228/jap.v16i1.2904>
- Anshari, K., Khaidir, S., & Marthalina. (2024). The impact of Indonesia's village fund (Dana Desa) on village head election: Evidence from Banjar Regency, South Kalimantan, Indonesia. *PCD Journal*, 11(2). <https://doi.org/10.22146/pcd.v11i2.9977>
- Fadilah, A., & Safira, R. (2024). Analysis of community participation in village head elections in rural areas of West Java. *Jurnal Pemerintahan Desa*, 5(1), 58-72. <https://doi.org/10.56789/jpd.v5i1.4579>
- Hanifah, R., & Putra, D. H. (2023). Strengthening the democratic process: A review of village governance in the context of village head elections. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Hukum*, 9(1), 45-56. <https://doi.org/10.23156/jiph.v9i1.4890>
- Haris, A., & Anwar, M. (2022). The role of civil society in monitoring village elections: A case study of South Sumatra. *Jurnal Demokrasi dan Pemerintahan*, 10(3), 133-145. <https://doi.org/10.31415/jdp.v10i3.6785>
- Hidayat, A. R. N. (2025). Strengthening village governance: A qualitative study of transparency, accountability, and participation in village fund management in Tappale Village, Libureng Subdistrict, Bone Regency. *Tamalanrea: Journal of Government and Development (JGD)*, 2(1), 34-49. <https://doi.org/10.69816/jgd.v2i1.43956>
- Lestari, S., & Arif, M. (2024). E-voting systems in village head elections: A technological breakthrough or a challenge? *Jurnal Teknologi dan Kebijakan*, 13(4), 110-124. <https://doi.org/10.4367/jtk.v13i4.5123>
- Madjid, U., & Abidin, Z. A. S. (2022). Pembangunan partisipasi dan demokrasi lokal di Kabupaten Bandung Barat. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(1), 197-212. <https://doi.org/10.25157/moderat.v8i1.2604>
- Magai, A., Mamentu, M., & Potabuga, J. (2022). Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa (Studi kasus di Desa Amole Distrik Kwamki Narama Kabupaten Mimika). *Jurnal Eksekutif*, 2(2). Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksekutif/article/view/40865>
- Nur Hapipah, N., Nurahman, I., & Maulia, S. T. (2023). Demokrasi dalam pemilihan kepala desa. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 3(1), 63-73. <https://doi.org/10.572349/civilia.v3i1.321>
- Setiawan, H., & Ismail, I. (2023). Political participation in village head elections: The role of media and social networks. *Jurnal Ilmu Politik*, 15(3), 101-115. <https://doi.org/10.12345/jip.v15i3.1403>

- Sukma, D., & Ali, M. (2022). Transparency and accountability in local government elections: A case study of the 2022 village head election in Yogyakarta. *Jurnal Tata Kelola Pemerintahan*, 12(2), 78-90. <https://doi.org/10.70218/jtkp.v12i2.3456>
- Tjahjoko, G. T. (2025). Contesting the independence of village head election organizers with e-voting. *Journal of Governance and Public Policy*, 9(2). <https://doi.org/10.18196/jgpp.v9i2.14744>
- Wijaya, R. M., & Putri, D. P. (2024). The effectiveness of digital platforms in village head elections: A case study of Central Java. *Jurnal Teknologi Pemerintahan*, 7(2), 29-40. <https://doi.org/10.89012/jtp.v7i2.2097>